

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, DJSN, ASKES, DAN JAMSOSTEK)**

---

Tahun Sidang : 2009-2010  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : Dewan Kesehatan Rakyat Jawa Barat  
Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari/tanggal : Kamis, 26 November 2009  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : Audiensi  
Ketua Rapat : Dr. Ahmad Nizar Shihab, SpAn/ Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Anggota : 31 orang anggota dari 46 Anggota, 6 orang anggota izin.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat dibuka pukul 11.15 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Tata Tertib DPR RI pasal 245 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN**

1. DKR menginformasikan bahwa pengobatan massal yang dilakukan guna mengeliminasi penyakit kaki gajah (filariasis) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengakibatkan 8 korban tewas dan 553 warga dirawat inap di berbagai rumah sakit. Di daerah Tangerang Selatan, Banten mengakibatkan 18 warga dirawat akibat keracunan obat setelah para korban meminum *Diethyl Carbamazine (DEC)*, *Albendazole* dan *Parasetamol*.
2. Para korban meninggal dunia diduga akibat mengkonsumsi obat filariasis yang diberikan oleh kader PKK, karena proses pendistribusian obat tersebut dilakukan kurang sosialisasi, baik kepada masyarakat maupun kepada kader PKK, misalnya :

- Tidak ada penjelasan mengenai masyarakat yang menderita penyakit tertentu tidak diperbolehkan mengkonsumsi obat filaris tersebut.
  - Tidak ada kejelasan mengenai dosis obat yang harus diberikan.
  - Mengenai efek samping yang timbul bila minum obat tersebut.
  - Dalam pemberian obat kepada masyarakat, tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
  - Saat pemberian obat tidak didampingi oleh tenaga medis.
  - Di setiap Posyandu hanya diberikan 1 (satu) leflat tentang informasi pengobatan filariasis.
3. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Provinsi Jawa Barat dan keluarga korban Pengobatan Massal Filariasis, mengharapkan dukungan Komisi IX DPR RI, antara lain:
    - a. STOP semua pengobatan massal untuk mencegah filariasis di seluruh pelosok Indonesia sampai obat yang akan dibagikan kepada masyarakat dapat dipastikan aman.
    - b. Panja penyakit kaki gajah yang akan dibentuk Komisi IX DPR RI, diharapkan mengkaji dan meneliti kasus ini hingga tuntas.
    - c. DPR RI untuk mendesak Presiden SBY mengganti Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih karena telah gagal melakukan perlindungan kesehatan yang merupakan hak dasar rakyat Indonesia serta melakukan kebohongan publik dalam wawancara dengan media.
    - d. Kepada Rakyat Indonesia dan Jawa Barat, Jangan memberikan SAMPEL DARAH tanpa kejelasan tujuan pengambilan sampel darah. Minta kejelasan kepada pihak-pihak yang menekan untuk pengambilan darah.
  4. Diduga terjadi intimidasi terhadap korban pengobatan yang menimbulkan situasi yang kurang kondusif, sehingga mereka takut hadir dan melaporkan kejadian tersebut kepada DPR RI.
  5. Pasca pengobatan massal filariasis yang menimbulkan jatuh korban meninggal dunia, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung belum memberikan penjelasan secara jelas kepada masyarakat mengenai penyebab jatuhnya korban, hanya memberikan klarifikasi bahwa obat yang diberikan untuk pengobatan massal bukan sebab utama kematian, sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi yang pasti terhadap kasus tersebut.
  6. Program pengobatan massal terhadap penyakit filariasis perlu dilanjutkan akan tetapi perlu dikaji kembali serta perlu kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

### III. CATATAN PENTING

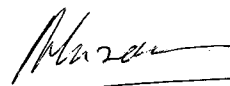
1. Komisi IX DPR RI menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap keluarga korban yang meninggal karena koinsidens mengkonsumsi obat filariasis yang berjumlah 5 (lima) orang.
2. Komisi IX DPR RI menerima semua masukan dari Dewan Kesehatan Rakyat Jawa Barat dan akan menjadikannya sebagai bahan masukan saat rapat dengan Menteri Kesehatan RI dan instansi terkait lainnya

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 26 November 2009

Pimpinan Komisi IX DPR RI

Wakil Ketua,



**Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, SpAn**